

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Annie Mustika Putri¹, Linda Hetri Suryanti², Aldila Mayangsari Hastanto³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Riau

annemustika@umri.ac.id

Abstract

Based on Permendagri No. 13 of 2006 effectiveness is defined as a program outcome policy with predetermined targets, namely by comparing expenses with results. Effectiveness is the success of an organization in achieving its planned goals. This study aims to identify and analyze whether the influence of Human Resource Competence, Functional Supervision, Regional Financial Accounting System (SAKD) and Government Internal Control Systems (SPIP) has on the Effectiveness of Regional Financial Management in Regional Apparatus Organizations in Riau Province. The research method in this thesis is descriptive statistical analysis, data quality test, classic assumption test and hypothesis testing. The independent variables in this study are Human Resource Competence, Functional Supervision, Regional Financial Accounting Systems (SAKD) and Government Internal Control Systems (SPIP) while the Dependent Variable is the Effectiveness of Regional Financial Management. This research is a quantitative research. The type of data used is primary data which is cross sectional which is obtained by distributing Likert-scale questionnaires. The population in this study were all employees who were in the Regional Apparatus Organization (OPD) of Riau Province using purposive sampling and obtained 190 people as samples. The results of this study prove that the partial hypothesis test between Human Resource Competency Variables, Functional Oversight, Regional Financial Accounting System (SAKD) and Government Internal Control System (SPIP) has a positive effect on the Effectiveness of Regional Financial Management in Regional Apparatus Organizations of Riau Province.

Keywords: Human Resource Competence, Functional Supervision, Regional Financial Accounting System (SAKD), Government Internal Control Systems (SPIP), Regional Financial Management.

Abstrak

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 efektivitas diartikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. Metode dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Variabel Independen pada penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sedangkan Variabel Dependennya adalah Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer bersifat cross section yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner berskala likert. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua karyawan yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 190 orang sebagai sampel. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa uji hipotesis yang dilakukan secara parsial antara Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Efektivitas Pengelolaan Keuangan.

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang ada pada suatu instansi harus ditata dengan sedemikian rupa agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Diera otonomisasi sekarang, pemerintah daerah

membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangannya dengan baik. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, elemen

manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut pertanggung jawaban dan pengawasan sesuai dengan meliputi : Akuntabilitas, *Value for Money*, kejujuran peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam mengelola keuangan publik, transparansi, dan Penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau pengendalian [1]. Pelimpahan tanggung jawab akan tujuan kepentingan publik. Efektivitas diukur diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan dan berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta dan prosedur organisasi dapat mencapai tujuan yang perimbangan keuangan pusat dan daerah [2]. Kalau telah ditetapkan sebelumnya [5]. Tujuan pengelolaan pengelolaan keuangannya sudah efektif dan efisien berarti adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efektif dan efisien maka perlu untuk didorong atau ditekan lagi agar pengelolaannya akan lebih baik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan, daerah pun semakin lama semakin membaik. Untuk mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Riau untuk tahun 2018 - 2019 secara berturut - turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun telah mendapat opini WTP masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat berakibat pada kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, juga ditemukan adanya penyimpangan administrasi yang tidak menimbulkan dampak finansial. Berdasarkan analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Riau pada 2018 dan 2019, kerugian di Provinsi Riau dibagi dengan rincian sebesar Rp 8,9 Miliar (2018) dan Rp 6,5 Miliar (2019). Dengan adanya temuan tersebut, Taufik berharap pemerintah daerah di Riau bisa memperbaiki kinerja dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan ke depannya. Temuan yang berdampak pada kerugian negara dapat berakibat pada indikasi adanya perbuatan korupsi [3]. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya ketidak efektifan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak serius melakukan perbaikan kinerja keuangan sesuai ketentuan perundang - undangan, hal itu dibuktikan dengan adanya temuan yang berulang - ulang dari tahun ke tahun, bahkan terdapat peningkatan nilai kerugian negara dalam tiga tahun terakhir [4]. Maka pemerintah daerah dituntut untuk responsif dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah agar bisa berjalan dengan efektif. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya baik dari segi

perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya [5]. Tujuan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu serta pengawasan dengan menggunakan tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar - benar terpungut, jelas sumbernya, dan tepat penggunaannya. Pemerintah daerah harus mengurus keuangan secara memadai, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah:

1. Penyelesaian kegiatan tepat waktu, mengacu pada ketaatan jadwal penyelesaian tugas yang sudah ditetapkan.
2. Penyelesaian kegiatan sesuai batas anggaran yang tersedia, mengacu pada jumlah pengeluaran untuk penyelesaian kegiatan telah sesuai dengan jumlah yang dianggarkan.
3. Pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana, mengacu pada tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan serta melakukan pengeluaran dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, dan efisien. Efektivitas merupakan salah satu sistem penilaian yang dapat digunakan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan [6].

Apabila hasil suatu layanan telah mencapai dampak yang diharapkan atau ditargetkan melalui perbandingan antara *outcome* dengan *output* maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif [7]. Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah yaitu variabel sumber daya manusia, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai hasil kinerja individu yang efisien dan efektif [8]. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien [9]. Kondisi kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas membuat tidak signifikan terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah [10]. Terdapat fungsi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu :

1. Pengetahuan (*knowledge*), kemampuan yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang ditekuninya, misalnya bahasa komputer.
2. Kemampuan (*skill*), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Perilaku individu (*behavior*), perasaan (senang - tidak senang, suka - tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji. Konsep dasar kompetensi ini berakar dari konsep individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja lebih baik [11].
3. Badan pengawasan Daerah (BAWASDA) Provinsi. Badan pengawas daerah provinsi merupakan instansi pengawas yang berada di provinsi dibawah Gubernur. Badan ini melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi dan melakukan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat.
4. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten atau Kota. Badan pengawasan daerah kabupaten atau kota merupakan instansi pengawas yang berada di daerah dibawah bupati atau walikota. Badan ini melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat. Aparat pengawasan fungsional pemerintah [14].

Dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah maka akan bisa melakukan kerja dengan maksimal untuk menunjang potensi penerimaan daerah[12]. Variabel kedua yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Variabel Pengawasan Fungsional. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring dan evaluasi [13]. Aparat Pengawasan Fungsional di bagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) merupakan instansi pengawas dan pemeriksa keuangan dan pembangunan yang berada di lingkungan pemerintah. BPKP harus melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPKP disampaikan kepada menteri atau pejabat lain yang bersangkutan.
2. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri atau Irjen Depdagri. Aparat pengawasan internal di lingkungan departemen dalam negeri adalah Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri yang melaporkan hasil pemeriksaan kepada menteri dalam negeri sebagai penanggungjawab umum manajemen pemerintah. Ruang lingkup pengawasan Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri mencakup substansi program dan administrasi manajemen pemerintahan. Substansi program tersebut meliputi tugas pokok dan
3. Badan pengawasan Daerah (BAWASDA) Provinsi. Badan pengawas daerah provinsi merupakan instansi pengawas yang berada di provinsi dibawah Gubernur. Badan ini melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi dan melakukan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat.
4. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten atau Kota. Badan pengawasan daerah kabupaten atau kota merupakan instansi pengawas yang berada di daerah dibawah bupati atau walikota. Badan ini melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat. Aparat pengawasan fungsional pemerintah [14].

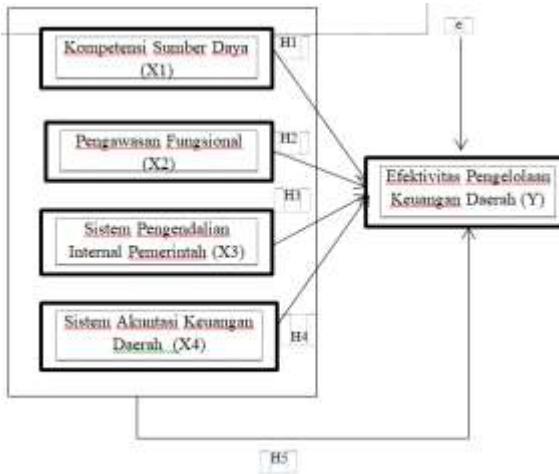
Tujuan Pengawasan Fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu organisasi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan [15]. Variabel ketiga yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer [16]. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD [17]. Pemahaman atas SAKD yang baik, akan menghasilkan penatausahaan keuangan daerah yang memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Tujuan utama adanya kebijakan pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan (GCG) yang baik dan bersih, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Faktor Keempat yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai, Dengan adanya pengendalian internal maka seluruh proses pengendalian, evaluasi, review dan

pengawasan terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah diterapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang berarti kinerjapun akan baik [18]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), definisi pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketataan terhadap peraturan perundang – undangan. Dengan adanya pengendalian internal maka seluruh proses pengendalian, evaluasi, *review* dan pengawasan terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah diterapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang berarti kinerjapun akan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Tahun 2018 terdapat 1.279 kelemahan Struktur Pengendalian Internal, 2.753 kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan 1.826 kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, Lemahnya SPI yang dimiliki pemerintah dapat mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerahnya hingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak andal [19]. Dapat dilihat masih adanya masalah dalam Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun model penelitian dalam penelitian ini disusun dalam bagan/skema kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

H2: Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

H3: Pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

H4: Sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga sebagai masukan bagi para Pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan referensi bagi pembaca terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu penelitian yang informasinya berupa angka yang digunakan sebagai alat untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan serta untuk menjawab rumusan masalah dari suatu penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode

Purposive Sampling, yang mana kriteria sampel memenuhi kriteria untuk diolah ada sebanyak 144 ditentukan atas dasar bahwa sampel tersebut merupakan kuesioner dengan tingkat persentase 75%.

pihak yang terlibat secara langsung dalam rekapitulasi transaksi keuangan OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 190 responden dari 38 OPD, yang terdiri mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari Kepala Dinas masing-masing OPD, Kepala berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase dari Keuangan masing-masing OPD, Staff Bagian Keuangan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), masing-masing OPD, Penjabat Pelaksana Teknis Pengawasan Fungsional (X2), Sistem Akuntansi Kegiatan masing-masing OPD, dan Staff Penjabat Pelaksana Teknik Kegiatan masing-masing OPD.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari Kepala Dinas masing-masing OPD, Kepala berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase dari Keuangan masing-masing OPD, Staff Bagian Keuangan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pengawasan Fungsional (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis pada uji parsial (uji *t*) dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) 26 for windows.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif sebagai statistik yang berguna untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif bisa dilakukan guna menentukan kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata - rata sampel atau populasi. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel - variabel dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan meliputi jumlah sampel, yang diolah dengan valid 100%, dengan keterangan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata - rata (mean) dan standar deviasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari analisis data berdasarkan variabel-variabel yang dipakai dalam model regresi berganda. Peneliti memberikan kuesioner tersebut kepada 190 responden yaitu 5 orang pegawai yang ada di setiap OPD Provinsi Riau. Kuesioner diberikan kepada responden dengan cara menyebarkan secara langsung kepada responden di masing - masing OPD Provinsi Riau. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu berupa kuesioner. Jumlah kuesioner yang diberikan kepada responden secara keseluruhan sebanyak 190 kuesioner, dengan tingkat kuesioner yang kembali sebesar 90% atau sebanyak 181 kuesioner. Terdapat 19 kuesioner yang tidak kembali dengan alasan pegawai yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas. Serta terdapat 27 kuesioner yang tidak dapat diolah karena berbagai hal. Contohnya kuesioner yang kembali terdapat isian yang tidak lengkap dan kuesioner yang dikirim kembali kosong. Kuesioner yang kembali dan

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	144	29	40	35,92	3,116
Pengawasan Fungsional	144	25	35	31,06	2,633
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	144	26	40	34,69	3,435
Sistem Pengendalian Internal	144	28	45	39,10	4,208
Pemerintah Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	144	27	40	35,11	3,381
Valid N (listwise)	144				

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian dengan jumlah responden (N) sebanyak 144 responden data Pengukuran yang digunakan meliputi jumlah sampel, yang diolah dengan valid 100%, dengan keterangan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata - rata (mean) dan standar deviasi.

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 29, nilai maksimumnya 40, dan nilai rata-rata 35,92 dan nilai standar deviasi sebesar 3,116. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
2. Pengawasan Fungsional diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 25, nilai maksimumnya 35, dan nilai rata - rata 31,06 dan nilai standar deviasi sebesar 2,633. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 26, nilai maksimumnya 40, dan nilai rata - rata 34,69 dan nilai standar deviasi sebesar 3,435. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 28, nilai

maksimumnya 45, dan nilai rata - rata 39,10 dan nilai standar deviasi sebesar 4,208. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

5. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 27, nilai maksimumnya 40, dan nilai rata - rata 35,11 dan nilai standar deviasi sebesar 3,381. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu, instrumen dikatakan realibel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrumen ini dapat digunakan dengan aman karena dapat bekerja sama dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel		α	r_{kritis}	Kriteria
1	Kompetensi Sumber Daya		0,841	0,6	Reliabel
2	Pengawasan Fungsional		0,784	0,6	Reliabel
3	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah		0,829	0,6	Reliabel
4	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		0,881	0,6	Reliabel
5	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah		0,834	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y melebihi nilai r_{kritis} yaitu sebesar 0,6 atau 60%. Jika nilai Cronbach lebih besar dari 0,6 atau 60%, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel, karena nilai *alpha cronbach* $> 0,6$.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Cara uji normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik (Uji *Kolmogrov-Smirnov*), analisis grafik dan histogram. Uji *Kolmogrov-Smirnov* memiliki kriteria jika nilai *sig.* Atau probabilitas $> 0,05$, maka data distribusi normal, dan jika nilai *sig.* Atau probabilitas $< 0,05$, maka data distribusi tidak normal. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Uji Normalitas (Uji Kolmogrov-Smirnov)

N		144
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,67470602
Most Extreme Differences	Absolute	0,107
	Positive	0,107

Test Statistic	Negative	-0,058
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,107	,150 ^c

Dari hasil data pengujian normalitas pada tabel di atas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,150 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel - variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). Variabel bebas mengalami multikolinearitas jika tolerance hitung $< 0,1$ dan $VIF_{hitung} > 10$. Hasil uji multikolonieritas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF)

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
X_1	0,734	1,370	Karena angka tolerance
X_2	0,878	1,239	di atas angka 0,1 dan
X_3	0,769	1,321	VIF di bawah angka 10,
X_4	0,876	1,230	maka tidak terjadi multikolinieritas.

Dari tabel diatas nilai Tolerance dan VIF nya memenuhi syarat. Dengan demikian penelitian ini terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik yaitu gejala multikolinearitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel - variabel independen terhadap variabel dependen. Uji regresi berganda ini akan memungkinkan untuk memberikan estimasi besarnya variabel dependen jika variabel - variabel independen dirubah [20]. Hasil uji regresi berganda disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	9,10	3,088		2,948	,104
Kompetensi Sumber Daya	,349	,064	,238	3,877	,003
Manusia Pengawasan Fungsional	,463	,077	,352	4,822	,001
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,480	,085	,361	5,389	,000
Sistem	,092	,483	,483	6,103	,000

Pengendalian Internal Pemerintah	,525
----------------------------------	------

Dari tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y = 9,103 + 0,349 X_1 + 0,463 X_2 + 0,480 X_3 + 0,525 X_4$$

Dimana :

Y: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 : Pengawasan Fungsional

X_3 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_4 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas. menunjukkan nilai persamaan untuk konstanta (a) sebesar 9,103. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol, maka Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 9,103. Untuk Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) bernilai 0,349 (bernilai positif), berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) yang semakin baik berdampak positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,349 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel Pengawasan Fungsional (X_2) bernilai 0,463 (bernilai positif), berarti Pengawasan Fungsional (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Pengawasan Fungsional (X_2) yang semakin baik berdampak positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Pengawasan Fungsional sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,463 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) bernilai 0,480 (bernilai positif), berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) yang semakin baik berdampak positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,480 dan sebaliknya dengan

asumsi variabel lain tetap. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_4) bernilai 0,480 (bernilai positif), berarti Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_4) yang semakin baik berdampak positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,480 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Signifikansi Parsial (Uji - t)

Untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (t test). Jika sig lebih kecil dari taraf 5%, maka memiliki pengaruh yang signifikan. Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$. Maka nilai untuk rumus $t_{\text{tabel}} = t(\alpha/2; n - k - 1) = t(0,05/2; 144 - 4 - 1) = (0,025; 139) = 1,977$. Hasil uji t disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji - t

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	9,103	3,088		2,948	,104
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,349	,064	,238	3,877	,003
Pengawasan Fungsional	,463	,077	,352	4,822	,001
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,480	,085	,361	5,389	,000
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,525	,092	,483	6,103	,000

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,877 sementara t_{tabel} 1,977 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan (H_0 ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Semakin Kompeten Sumber Daya Manusia yang mengelola maka pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin efektif. Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,822 sementara t_{tabel} 1,977 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan

bahwa hipotesis Ha diterima dan (Ho ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,389 sementara t_{tabel} 1,977 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha diterima dan (Ho ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,103 sementara t_{tabel} 1,977 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha diterima dan (Ho ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,790 ^a	,649	0,634	1,527

Dari tabel di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Fungsional, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) terhadap variabel dependen (Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah) sebesar 0,634 atau 63,4% sedangkan 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah. hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam suatu instansi maka akan semakin tinggi juga tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan. Pengawasan

fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah. hal ini berarti semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan dalam suatu instansi maka akan semakin tinggi juga tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah. hal ini berarti semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dimiliki dalam suatu instansi maka akan semakin tinggi juga tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah. hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah yang dimiliki dalam suatu instansi maka akan semakin tinggi juga tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan.

Daftar Rujukan

- [1] Christina. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Liabilitas*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v4i1.44>
- [2] Gusti, D. P. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 14(2), 36–48. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v14i2.1887>
- [3] Husaini, H., Aisyah, S., & Verawati, H. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Universitas Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 5(2), 47–68. <https://doi.org/10.33369/fairness.v5i2.15306>
- [4] Paranga, J. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 5(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i1.1216>
- [5] Amerieska, S., Setiati, F., & Mulyono, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(2), 53–65. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i2.20>
- [6] Ontorael, H. K., Rotinsulu, D. Ch., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(5). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19391.19.5.2018>
- [7] Yunita, N., & Putra, I. S. (2018). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas PORBUDPAR Kota Blitar. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), 95–108. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.337>

- [8] Zulhaninta, Z. T., & Ardhiarisca, O. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17(2), 140–150. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i2.2582>
- [9] Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah, U. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita*, 12(1), 28. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.003>
- [10] Agung, T. M., & G. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 1253. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p17>
- [11] Panjaitan, F. B., Margaret, R., & Carolina, Y. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budgetary Slack pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Propinsi Jawa Barat. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 75–90. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1529>
- [12] Surya, S., Barusman, A. R. P., & Dunan, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia. *Visionist*, 9(1). <https://doi.org/10.36448/jmv.v9i1.1685>
- [13] Megasiwi, I. A., & Adi, P. H. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v13i1.1898>
- [14] Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>
- [15] Tama, A. I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(2), 36–49. <https://doi.org/10.51289/peta.v5i2.439>
- [16] Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 9–20. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14>
- [17] Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(3), 1111–1130. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.131>
- [18] Liza, W. J., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 959–976. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.120>
- [19] Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19771.19.6.2018>
- [20] Khoirunisa, N., & Ahmad, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 82–91. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3189>